

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)**

**Ayu Mentari Suryadi & Sufi**

Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussaleh  
Email: *sufi@unimal.ac.id*

### **ABSTRAK**

Masyarakat nelayan di desa keude bungkaih masih hidup dalam garis kemiskinan dimana masih banyak nelayan yang bergantung kepada para tengkulak dan masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak layak (tradisional) dan masih banyak juga nelayan yang perlu diberdayakan, hasil yang didapatkan juga tidak maksimal. Pihak pemerintah mengucurkan program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan supaya bisa mandiri dan bisa menghasilkan tangkapan yang lebih baik sehingga dapat mensejahterakan nelayan. Penelitian ini berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat nelayan dengan focus penelitian pada jenis bantuan peralatan nelayan dan difokuskan pada hambatan internal dan eksternal dalam memberdayakan masyarakat nelayan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dinas kelautan dan perikanan Aceh Utara dan mengetahui hambatan internal serta eksternal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan alat tangkap dan boat, melakukan sosialisasi cara penggunaan alat tangkap dan mekanisme pemberian bantuan, dilihat dari strategi sudah baik akan tetapi terkendala dikarenakan kurangnya fasilitas bantuan yang diberikan, kurangnya Sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan kepada para nelayan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata dan tidak efisien. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Melihat dari strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan oleh pemerintah masih kurangnya fasilitas bantuan, kurangnya Sumber daya manusia dan pengawasan yang diberikan kepada para nelayan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata kepada semua kelompok nelayan, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Adapun saran dari peneliti yaitu pemerintah dapat memberikan bantuan baik barang (peralatan nelayan) juga pemberian modal usaha.

**Kata Kunci:** *Strategi, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan (2015), bahwa 121,76 juta orang atau 46 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS 2015), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 35,83 juta orang (15,27 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (62,52 persen) penduduk miskin di Indonesia berada didaerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2015). Berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih sangat besar sebagaimana yang disebutkan diatas maka sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat Nelayan.

Di lain sisi Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3,544 juta km<sup>2</sup> dan memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya. Diperkirakan pendapatan dari sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, perikanan

juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil karena mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan.

Masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan social, yaitu tradisional, *direct action* ( aksi langsung), dan transformasi ( Hanna dan Robinson, 1994 dalam Hikmat, 2006 : 54)(1) strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. (2)Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam

membuat keputusan. (3) Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

### **Program Pembangunan Pedesaan**

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2004). Penjelasan macam-macam program sebagai berikut : Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi Negara maju.

Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja di pedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan,

mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

Selanjutnya Program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternative untuk meningkatkan jarak ideal antara pedesaan dan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah dengan membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), mengajukan strategi yang meliputi: (1) Strategi pembangunan gotong-royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal-Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultur. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai system social. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

### **Strategi Pembangunan Teknikal – Profesional**

Dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam

menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara-cara yang lebih kreatif sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

### **Strategi Konflik**

Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

### **Strategi Pembelotan Kultural**

Menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong

dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), perencana (planner), advokasi (advication), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat pasal 10 permendagri RI No.7 Tahun 2007). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan strategi pemabangunan Teknikal- Profesional.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 Km garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta Km<sup>2</sup> (Berdasarkan konvensi PBB tahun 1982), Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan nonhayati yang melimpah (Simanungkalit dalam Resosudarmo, dkk, 2002: 32).

Menurut Yusuf (2003:2) “pemberdayaan sebagai usaha penguatan yang lemah dengan kata lain pemberdayaan adalah usaha penguatan masyarakat yang lemah baik secara ekonomi, politik, dan social budaya”

Sedangkan Mubyarto (1997: 7) menjelaskan pemberdayaan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. “pemberdayaan” terlihat muncul kepada sasaran politis,

sedangkan “peningkatan kemampuan” muncul lebih bersifat netral (nonpolitis), sehingga lebih diterima bagi ahli tenis yang tidak ingin terpengaruh dengan semua yang mungkin dapat memunculkan kecacatan ideology atau politik. Kata “perkuatan” dapat diletakkan pada keduanya.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka sendiri. (Lucie, 2005)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Kartasmita, 1996 :144)

Para ahli di atas tidak jauh berbeda dalam memberikan definisi tentang pemberdayaan dimana pemberdayaan adalah dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat diarahkan pada perekonomian yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dari setiap anggota masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan budaya tertentu. Sebagai contoh, upaya pemberdayaan pada

masyarakat petani tidak sama dengan pemberdayaan pada masyarakat nelayan, walaupun tujuan pemberdayaan adalah sama.

### **Tujuan Pemberdayaan**

Menurut wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 47) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotrik, efektif, dengan mengarahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, psikomotrik, efektif dan konatif) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004: 80-81)

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat pesat kemajuannya. Berbagai jenis kebutuhan manusia telah berkembang dengan berbagai kemudahan, untuk menunjukkan manusia dalam menjalankan kehidupannya, yang ditandai dengan berbagai bentuk dan model kecanggihan teknologi.

Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru itu telah menggiring manusia ke arah yang lebih baik, dan sejahtera. Akan tetapi ternyata hanya sebagian kecil saja yang menikmati perkembangan kemajuan teknologi tersebut. Serta masih banyak masyarakat yang bergelimpangan dengan kehidupan tradisional, dan miskin. Karena kemiskinannya sehingga tak mampu menjangkau atau meraih kehidupan modern tersebut.

### **Aspek- aspek Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pengertiannya aspek-aspek pemberdayaan masyarakat adalah bidang-bidang atau unsur-unsur pokok yang menjadi prioritas untuk diberdayakan, bagi suatu organisasi. Tentunya setiap organisasi berbeda-beda tentang prioritas bidang yang akan diberdayakan, umpamanya suatu perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang-barang elektronik tentu akan berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam usaha perikanan hasil tangkap. Adapun masalah terpenting yang harus mendapat perhatian dalam usaha pemberdayaan di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bidang pelelangan ikan resmi masyarakat nelayan.

Aspek yang menyangkut masalah kesejahteraan social tersebut dalam arti sempit maksudnya adalah yang mengalami masalah kesejahteraan social belum menjurus pada masalah dengan segala kompleksitasnya, masalah tersebut baru merupakan masalah yang terkait dengan masalah lain dalam tindakan-tindakan yang sifatnya saling kait-mengkait, koordinatif dan belum direalisasi dalam penanganannya baik orang yang mengalami masalah yang belum dapat sesuatu kelompok masyarakat ataupun belum adanya suatu kegiatan dan kemampuan secara cepat dan tepat berupa tindakan, semangat para pelaksana pembangunan dibidang kesejahteraan social. Dalam merealisasikan yang dijelaskan adalah keterpaduan kerja sama yang baik antara mitra maupun intra sektoral.

Mubyarto, (1997: 21) konsep pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan potensi yang ada pada suatu daerah merupakan langkah tepat dalam mewujudkan sekaligus melaksanakan pembangunan pada suatu daerah. Melalui perspektif tersebut otonomi berkaitan dengan upaya menggerakkan demokratisasi. Demokratisasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Disini demokrasi lebih menekankan pada partisipasi dan artikulasi kepentingan rakyat ke dalam system pemerintah.

### **Tahap- tahap Pemberdayaan**

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literature didunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Pembangunan Sosial di akaopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternative pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradig baru pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradig baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (participacy), pemberdayaan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable)” (Chambers, 1995 dalam kartasamita, 1996)

### **Masyarakat**

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Society. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Sementara menurut Koertjaraningrat (2000: 46) “ masyarakat adalah kesatuan hidup, manusia yang berinteraksi, menurut suatu system, adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Dikaitkan dengan tempatnya, masyarakat mengacu pada desa, kecamatan, kota yang memiliki pola kehidupan masing-masing. Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat-istiadat yang turut mewarnai system pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. (februana, 2008: 30) Menurut Paul B. Horton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain, Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. (Zarifah, 2013)

### **Masyarakat Nelayan**

Pada dasarnya istilah masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan penyebutan masyarakat nelayan, hal ini disebabkan karena mayoritas dari pekerjaan masyarakat pesisir adalah nelayan. Adapun pengertian dari nelayan sebagaimana didefinisikan oleh Dirjen Perikanan (Kusnadi, 2006:2), yang disebut nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Terkadang masyarakat pesisir (Costal Community) juga

diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005:143).

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka dilaut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. (Suharto, 2005)

### **C. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam Penelitian ini adalah di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Muara Batu dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan karena Kecamatan Muara Batu merupakan kecamatan yang penduduknya sebagian bekerja sebagai nelayan dan tinggal didaerah pesisir. Penulis melihat fenomena kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin pesisir, hal itu terlihat dari tidak adanya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat pesisir berdasarkan hasil observasi awal penulis.

Menurut Restu (2010: 84), metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

wawancara. Wawancara tak-terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis kepada beberapa orang informan. (Restu, 2010 :241)

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan .**

Salah satu indikator keberhasilan sebuah strategi adalah pencapaian tujuan yang telah direncanakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejauh ini strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan para nelayan miskin sudah baik, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan yang terus-menerus. Tetapi pihak pemerintah harus lebih menekankan lagi dalam memilih strategi yang akan digunakan untuk memberdayakan para nelayan, karna banyak didapati bahwa nelayan tersebut tidak menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik.

##### **Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan**

Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kait, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan. Pemberian alat tangkap dan boat sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan, karena alat pancing sendiri merupakan hal pokok yang utama yang dibutuhkan para nelayan setelah boat. Alat tangkap juga sangat diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa alat tangkap dan boat untuk nelayan miskin. Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan bantuan tersebut, nelayan hanya membuat kelompok dengan jumlah 12 orang dan mengajukan proposal ke pusat untuk meminta bantuan, kemudian bantuan akan disalurkan kepada para nelayan dengan beberapa alat tangkap lengkap dan 6 (enam) boat untuk satu kelompok. Bantuan diberikan kepada nelayan dengan perantara penerima bantuan, penerima bantuan akan melihat dan memilih nelayan mana saja yang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan, kemudian para nelayan membuat proposal yang akan diajukan ke dinas dan setelah itu barulah bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat nelayan, sebelumnya diadakan sosialisasi bagi para nelayan yang mendapatkan bantuan dengan cara mengajari penggunaan alat bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sosialisasi yang diberikan hanya sekali sebelum penyerahan bantuan dan setelahnya tidak ada sosialisasi atau pengawasan kembali.

Pemberian bantuan yang diberikan bersifat bergilir yaitu dimana semua Gampong yang ada disekitaran Muara Batu akan bergilir mendapatnya, tidak hanya satu kelompok saja yang terus-menerus mendapatkannya. Kemudian pula sifat bantuan yang diberikan kepada nelayan bersifat hibah, semua alat pancing dan boat yang telah diberikan kepada nelayan maka menjadi hak nelayan sepenuhnya untuk menggunakan tanpa harus mengembalikannya kembali. Setiap tahunnya dari pemerintah akan meminta data-data nelayan di Gampong untuk diberikan bantuan alat tangkap dan Boat.

Kemudian strategi ini sangat penting untuk para nelayan dalam mengembangkan dirinya dalam mendapatkan keuntungan dari pemberian alat

pancing tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari nelayan yang sudah berkembang dan mendapatkan keuntungan lebih, misalnya tidak perlu berbagi hasil dengan Toke Bangku, semua keuntungan yang didapatkan hanya akan dipergunakan untuk dirinya saja. Ini adalah salah satu fakta yang bisa kita lihat dari berhasilnya strategi pemberian alat tangkap kepada nelayan miskin. Untuk Pemerintah juga harus lebih melihat kembali apa saja yang dibutuhkan para nelayan selain berupa alat tangkap dan boat, lebih memberikan strategi gambaran baru dalam menangkap ikan dan mengasihkan ikan yang lebih banyak kedepannya dan bisa mensejahterakan para nelayan miskin yang ada di keude bungkah.

### **Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat Nelayan**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi dimasa yang akan datang, seluruh kegiatan perusahaan/instansi untuk jangka waktu tertentu. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah untuk para nelayan.

Bantuan yang diberikan hanya untuk beberapa kelompok saja yang terdiri dari beberapa orang misalnya dua atau tiga kelompok saja, selebihnya masih banyak masyarakat nelayan yang tidak kebagian dalam pemberian bantuan tersebut, masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Kemudian untuk penerimaan bantuan yang diberikan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, alat pancing yang diberikan bukan alat pancing dengan merek yang bagus tapi dengan merek kualitas yang kurang baik dan juga ukuran yang

diinginkan oleh pemancing dan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama sangat berbeda.

Bantuan yang diberikan tidak bisa merangkul semua nelayan yang ada, hal tersebut dikarenakan bantuan yang diberikan tidak hanya berpusat pada suatu kecamatan atau gampong saja tapi seluruh kabupaten Aceh Utara, makanya menyebabkan banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan, dari hasil penelitian juga bisa dilihat bahwa pemberdayaan yang diberikan menyeluruh untuk semua dan bergilir tidak semuanya mendapatkan bantuan tapi harus menunggu giliran mendapatkan bantuan tersebut.

### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Hambatan yang dialami oleh instansi salah satunya yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi dalam upaya mengembangkan perusahaannya. Dalam proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin para staf yang bekerja dibagian tersebut sangat kewalahan karena kurangnya SDM yang bekerja dibagian pemberdayaan masyarakat miskin. Tugas yang dikerjakan lebih banyak dari staf yang bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan akhirnya menjadi tidak efisien.

Pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa alat pancing, boat dan alat tangkap, sebelum pihak dinas memberikan bantuan

tersebut mereka mengadakan sosialisasi kepada para nelayan yaitu tata cara penggunaan alat pancing yang benar dan itu semua dilakukan oleh staf yang bekerja dibagian perkantoran karena kurangnya tim pengawasan lapangan. Sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh kepada pengawasan yang kurang optimal, hanya pengawasan dilakukan ketika pemberian bantuan tersebut, kurangnya SDM tersebut sangat berpengaruh penting terhadap pengawasan.

### **Kurangnya pengawasan**

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, pengawasan juga proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan sangat di perlukan oleh dinas kelautan, salah satu kendala yang di hadapi yaitu kurangnya pengawasan setelah memberikan bantuan boat dan alat tangkap.

Banyak nelayan yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan bantuan, seperti tidak menggunakan alat yang diberikan oleh pemerintah dan menjual nya dengan keperluan pribadi, dan uang tersebut dibagikan rata masing-masing nelayan. Oleh karena itu pengawasan terhadap sangat penting untuk dilakukan, apabila setiap mendapatkan bantuan selalu di jual maka nelayan tidak akan berkembang dan pendapatan ekonomi juga tidak meningkat, hal itu disebabkan ketergantungan nelayan dengan Toke Bangku sehingga hasil atau pendapatan yang didapatkan harus di bagi dengan Toke Bangku, selain itu juga pemerintah ingin membantu ketergantungan tersebut, tetapi tidak tercapai karena tidak adanya pengawasan.

### **Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri, kesadaran juga diartikan sebagai kondisi dimana individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun eksternal. Serta kendala lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat harus punya keinginan dalam menggunakan atau mempergunakan bantuan yang diberikan. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat, seterusnya kembali kepada Nelayan itu sendiri bagaimana cara menggunakan bantuan yang telah diberikan. Seperti banyak nelayan yang menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah, keinginan pemerintah supaya para nelayan miskin berkembang dan terpedaya akan sia-sia apabila nelayan sendiri tidak punya motivasi dan keinginan yang besar untuk berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat diperlukan supaya strategi yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Ketika pemerintah sudah membantu mengayomi para nelayan dengan memberikan bantuan alat tangkap dan boat, maka dari pihak masyarakat juga harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik, bukannya dengan menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, karena Pemerintah hanya bisa membantu dari luar selebihnya balik lagi kepada pribadi masyarakat nelayan tersebut.

### **Kurangnya partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanggapi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok.

Keikutsertaan masyarakat dalam ikut dalam proses pemberian bantuan adalah hal utama yang sangat diinginkan oleh masyarakat nelayan, tapi yang terjadi adalah banyak masyarakat nelayan yang tidak bisa berpartisipasi dalam hal tersebut karena kuota yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas dan hanya untuk orang-orang tertentu saja untuk orang yang terpih dan layak mendapatkan bantuan. Apabila melihat langsung dari masyarakat nelayannya semua diantara mereka ingin ikut berpartisipasi dalam pembuatan proposal sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hal tersebut bisa dicapai oleh sebagian masyarakat nelayan karena bermasalah pada jumlah kuota yang ditawarkan oleh pemerintah sangat minim.

#### **E. KESIMPULAN**

Strategi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat kepada nelayan, strategi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatkan hasil tangkapan para nelayan, sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya. Hambatan internal yaitu kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, serta kurangnya pengawasan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh S, (2004). *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Kampung*, Tim Lapera Pustaka Utama Jakarta
- Assaury, Sofyan, 1993 *Dasar Konsep dan Strategi*, LPFE, 1V, Jakarta.
- Februana, Ngarto. *Manual Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah*, Banda Aceh: International Organization for Migration, 2008.
- Friedman, Marilyn M. 1992. *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debora Ina R.L. 1998 (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Hanna, robinson, Hikmat, (2006), *Pengaruh Utama Partisipasi Masyarakat*, C.V.Cepruy, Jakarta.
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Penerbit PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartiko, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. 2000. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara.
- Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi offset.
- M.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti , 1988, h.256
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPEF.
- Setiana, lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Soekartawi. 1998. *Prinsip Dasar: Komunikasi Pertanian*, UI Press, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryabrata, sumadi. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: rajawali pers
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Wrihatnolo, Dwijowijoto, (2007). *Administrasi Program Dan Proyek Pembangunan*, IKIP, Malang.

Yusuf. 2003. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta, P3PK, Universitas Gajah Mada